



Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Utara 2018 di Desa Selemak Kecamatan Hampan Perak Kabupaten Deli Serdang

Political Participation of the Community in the Election of Governor and Deputy Governor of North Sumatra 2018 at Selemak Village, Hampan Perak District, Deli Serdang Regency

Noverman Halawa¹⁾, Abdul Kadir²⁾ & Armansyah Matondang³⁾*

1) Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik,
Universitas Medan Area, Indonesia

2) Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik,
Universitas Medan Area, Indonesia

3) Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik,
Universitas Medan Area, Indonesia

Abstrak

Terkait dengan partisipasi politik wilayah yang menjadi lokasi penelitian ini juga mengalami masalah dimana tingkat partisipasi politik masyarakat pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara 2018 masih sangat rendah. Apa penyebabnya perlu diidentifikasi agar bisa dicari solusi untuk mengatasinya. Untuk itu penelitian ini menjadi sangat penting dilakukan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik wawancara, pengamatan, dokumen dan trigulasi. Harapan data yang diperoleh bisa menjadi lebih komprehensif menggambarkan fakta di lapangan. Konsep yang dipakai dalam penelitian ini adalah konsep Arifin Anwar (2011) yang membagi tiga kajian partisipasi politik yaitu memberikan suara dalam pemilihan umum, kampanye dan lobi. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Utara 2018, dan Apa Faktor yang Menghambat Partisipasi Politik Masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh di lapangan menunjukkan bahwa partisipasi politik masyarakat sangat rendah, ada pun faktor yang menghambat partisipasi politik masyarakat yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Saran untuk yang akan datang diharapkan agar birokrasi bersifat netral dalam setiap pelaksanaan pemilihan kepala daerah, diharapkan juga agar pengawasan dalam pemilihan kepala daerah lebih diperketat.

Kata Kunci: Partisipasi Politik, Masyarakat, Pemilihan Gubernur

Abstract

Related to the political participation of the region which is the location of this study also discusses the problem at the level of political participation in the election of the Governor and Deputy Governor of North Sumatra 2018 is still very low. What causes it needs to be changed so that solutions can be found to overcome it, so this research is very important. This study uses qualitative methods with interview, observation, document and trigulation techniques. Hope the data obtained can be more complete than facts in the field. The concept used in this study is the concept of Arifin Anwar (2011) which divides three assessments of political participation, namely providing votes in elections, campaigns and lobbying. The problem in this study is the political participation of the society in the election of the Governor and Deputy Governor of North Sumatra 2018, and what factors are inhibiting the Political Participation of the Society. Based on the research results obtained in the field, it shows that political participation in the community is very low, there are also factors that involve community participation are internal factors and external factors. Suggestions for the future are expected so that the bureaucracy is neutral in very regional head election implementation, it is also hoped that supervision in the regional head election will be tightened.

Keywords: Political Participation, Society, Election of Governor

How to Cite: Halawa, N. Kadir, A & Matondang, A (2019). Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara 2018 di Desa Selemak Kecamatan Hampan Perak Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)*, 1(1) 2019: 48-56,

*E-mail: armansyahmatondang@staff.uma.ac.id

PENDAHULUAN

Pemilihan Kepala Daerah atau seringkali disebut dengan pilkkada adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung oleh penduduk daerah administratif setempat yang memenuhi syarat. Pilkkada secara langsung merupakan sebuah kebijakan yang diambil oleh pemerintah dan menjadi momentum politik besar yang sangat diharapkan oleh seluruh masyarakat Indonesia sebagai pilihan tepat untuk menuju proses demokratisasi, sesuai dengan salah satu tujuan reformasi yaitu mewujudkan Indonesia lebih demokratis yang hanya bisa dicapai dengan mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat. Perbedaan dasar pilkkada langsung dengan tatanan politik terwakil sebelumnya adalah tidak jelas statistik kehendak politik rakyat atas sosok kepala daerah yang akan memimpin.

Melalui pemilihan kepala daerah secara langsung berarti mengembalikan hak-hak dasar masyarakat di daerah untuk berpartisipasi dalam proses politik. Pilkkada langsung juga dapat dikatakan sebagai koreksi dari sistem pilkkada yang terdahulu yang menggunakan mekanisme perwakilan DPRD. Peralihan sistem perwakilan ke sistem pilkkada langsung menyiratkan bahwa telah adanya sebuah kemajuan dalam sistem politik dan melibatkan rakyat untuk ikut serta dalam menentukan masa depan bangsanya sendiri dengan jujur dan adil.

Latar belakang yuridis pilkkada langsung adalah UU No. 32 tahun 2004 sebagai revisi dari UU No. 22 tahun 1999 yang memuat regulasi pilkkada secara langsung. Seperti juga tertuang dalam pasal 18 ayat 4 UUD 1945. Bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Walikota. Masing-masing sebagai Kepala Pemerintahan Daerah Provinsi. Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis. Hal itulah yang diatur dalam UU No. 32 tahun 2004 bagian ke delapan tentang Pemilihan Kepala Daerah. Dalam pasal 56 (1) UU No. 32 tahun 2004 disebutkan bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Tujuan utama pilkkada langsung adalah penguatan masyarakat dalam rangka peningkatan kapasitas demokrasi di tingkat lokal dan peningkatan harga diri masyarakat yang sudah sekian lama dimarginalkan (Hasibuan, Kadir & Nasution, 2018; Zega, Muda, Batubara & Suharyanto, 2018).

Pilkkada juga merupakan salah satu sarana pendidikan politik bagi masyarakat yang bersifat langsung dan terbuka, yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai demokrasi. Partisipasi politik masyarakat pada pemilihan kepala daerah di setiap daerah berbeda-beda dan beragam, ada yang tingkat partisipasinya tinggi dan ada juga yang rendah, hal itu dipengaruhi status sosial, status ekonomi, afiliasi politik orang tua, sosialisasi, pengalaman berorganisasi dan kesadaran dari pemilih (Kusmanto, 2013; Kusmanto, 2014; Suharyanto, 2014; Wardhani, 2018; Ivanna, Pardede & Iqbal 2018; Suharyanto, 2016). Pemilihan kepala daerah yang terjadi diberbagai daerah juga sarat dengan keadaan dan situasi politik yang ada dimasing-masing daerah, termasuk di Provinsi Sumatera Utara. Harapan terhadap pilkkada langsung bisa menumbuhkan antusiasme politik rakyat yang diwujudkan dengan tingginya partisipasi politik. Namun realitanya dalam pilkkada masih ada masyarakat yang tidak berpartisipasi, dan hal ini pun

terjadi di daerah pada Provinsi Sumatera Utara khususnya di Desa Selemak pada waktu Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara dilaksanakan padatanggal 27 Juni 2018. Pilgub Sumut 2018-2022 diikuti oleh 2 (dua) pasangan calon. Masing-masing dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh 20 persen kursi di DPRD atau lebih di provinsi. Kedua pasangan calon tersebut adalah Edy Rahmayadi - Musa Rajekshah sebagai pasangan calon Nomor urut 1 dan Djarot Saiful Hidayat - Sihar Sitorus sebagai pasangan calon Nomor urut 2.

Pada kegiatan Pemilihan Kepala Daerah masyarakat diharapkan ikut terlibat dalam kegiatan pemilihan tersebut dan ikut dalam pengambilan keputusan dan ikut dalam memilih Kepala Daerah yang menjadi pilihannya. Tetapi pada kenyataannya pada setiap pemilu baik itu Pilkadaes, Pilpres, Pilkada, masih terdapat sebagian masyarakat yang tidak mengetahui betapa pentingnya partisipasi mereka dalam memilih kepala daerah, karena masyarakat belum sepenuhnya mengetahui manfaat pemilu. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat partisipasi memilih yang kurang dan masih ada masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya.

Desa Selemak terletak di Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang, dimana mayoritas penduduknya bekerja sebagai Petani dan Peternak. Latar belakang masyarakat Desa Selemak dengan mata pencarian petani dan peternak. Dalam menghadapi pemilihan umum sebagian masyarakat Desa Selemak cenderung tidak menaruh minat terhadap objek politik dan partisipasi politiknya cenderung rendah. Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara 2018 banyak pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya masih tinggi hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi kampanye di Desa oleh calon kepala daerah.

Dalam hal ini, peneliti akan meneliti partisipasi politik masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur SUMUT 2018. Bagaimana partisipasi politik masyarakat dan faktor-faktor apa saja yang menghambat partisipasi politik masyarakat Desa Selemak Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Selemak Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang, menjadi tempat memperoleh hasil/data penelitian, yang berjudul tentang partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara 2018. Penelitian ini dilakukan dari bulan Oktober 2018 - bulan Januari 2019.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu menganalisis data yang berhubungan dengan masalah yang dikaji dan dipilih yang berkualitas berdasarkan penelitian yang logis untuk menghindari kesalahan dan kekurangan data sehingga dapat menjawab permasalahan yang diajukan.

Informan kunci, yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. Informasi kunci dalam penelitian ini Sekretaris Desa Selemak. Informan utama, yaitu mereka yang terlibat secara langsung dalam interaksi social yang diteliti. Dalam penelitian ini yang berperan sebagai informan utama

adalah Pengawas TPS. Informan tambahan, yaitu orang-orang yang tidak terlibat secara langsung dalam persoalan penelitian namun mengetahui tentang masalah yang diteliti. Adapun informasi tambahan adalah dalam penelitian ini adalah beberapa orang warga di Desa Selemak.

Teknik Pengumpulan Data: Observasi (pengamatan), Interview (Wawancara), Dokumentasi, Trigulasi. Pada penelitian ini, metode analisis data yang digunakan adalah analisis data selama di lapangan model Mile dan Huberman; Pengumpulan data (Data Collection), Reduksi Data (Data Reduction), Penyajian Data (Data Display), Kesimpulan Data

HASIL DAN PEMBAHASAN

Partisipasi politik adalah salah satu aspek penting suatu demokrasi. Partisipasi politik merupakan ciri khas dari modernisasi politik. Adanya keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga negara, berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik. Menurut Budiarmo Miriam (2008) menjelaskan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik seperti memilih pemimpin negara, yang secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kebijakan pemerintah (public policy). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen dan sebagainya.”

Di negara-negara demokrasi umumnya menganggap bahwa lebih banyak tingginya angka partisipasi masyarakat dalam pemilu menunjukkan demokrasi pada negara tersebut sudah berjalan dengan baik dan tetap dipercaya oleh warga negara. Dalam kontes lain, tingginya tingkat partisipasi juga menunjukkan bahwa warga negara terlibat dalam kegiatan-kegiatan politik, baik yang aktif maupun pasif. Tingkat partisipasi yang tinggi dalam pemilu juga menunjukkan sejauh mana proses pemilu berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip kebebasan untuk menentukan pilihannya. Sebaliknya, ada anggapan bahwa rendahnya partisipasi politik di suatu negara dianggap kurang baik bagi demokrasi karena memperlihatkan kurangnya perhatian dan kepedulian warga negara pada masalah politik. Gejala politik memang bukan semata-mata dipengaruhi oleh warga yang tidak peduli pada masalah politik, tetapi juga oleh faktor-faktor lain seperti kekecewaan politik, ketidakpercayaan, dan lain sebagainya.

Berdasarkan hal diatas maka hasil wawancara penulis dengan Bapak Faisal selaku Sekertaris desa selemak mengatakan: “Salah satu faktor rendahnya partisipasi politik masyarkat di Desa Selemak kalua menurut saya mungkin lebih karena masyarakat merasa bosan dan juga kekecewaan dengan pilkada karena tidak bisa merubah apa pun, kebanyakan masyarakat mengatakan dengan datang ke TPS hanya buang-buang waktu mereka sedangkan siapa pun yang jadi pemenang tidak memberikan keuntungan bagi mereka, sehingga banyak masyarakat tidak datang ke TPS mereka lebih memilih beristirahat di rumah.”(Wawancara 7 Februari 2019)

Hal yang sama juga disampaikan oleh ibu Norma selaku ibu rumah tangga mengatakan: “Adanya kekecewaan terhadap pihak yang bertugas untuk mengumpulkan KTP banyak masyarakat yang tidak tahu dan juga terlambat informasi baru disampaikan sudah tiba harijanya pilkada, sehingga masyarakat yang datang ke TPS yang belum ngumpulkan KTP harus antrian menunggu sampai selesai, sehingga masyarakat banyak yang tidak ikut memilih pada saat itu.”(Wawancara 12 februari 2019)

Partisipasi politik masyarakat pada pemilihan kepala daerah disetiap daerah berbeda-beda dan beragam, ada yang tingkat partisipasinya tinggi dan ada juga yang rendah, hal itu dipengaruhi oleh status sosial, status ekonomi, afiliasi politik orang tua pengalaman berorganisasi dan kesadaran dari pemilih. Pemilihan kepala daerah yang terjadi diberbagai daerah juga sarat dengan keadaan dan situasi politik yang ada dimasing-masing daerah, termasuk di desa Selemak. Harapan dari pilkada langsung bisa menumbuhkan antusiasme politik rakyat yang diwujudkan dengan tingginya partisipasi politik. Namun realitanya dalam pilkada masih ada banyak masyarakat yang tidak berpartisipasi, dan hal ini pun terjadi Sumatera Utara khususnya di Desa Selemak Kecamatan Hampan Perak pada waktu pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam Pilkada dapat dimaknai sebagai rasa kebosanan rakyat terhadap politik atau tidak adanya calon yang cukup menarik dan berkualitas yang ditunjuk oleh partai politik, sehingga tidak memberi harapan bagi perubahan.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 8 Februari 2019 dengan ibu Syahrini selaku KPPS Desa Selemak Kecamatan Hampan Perak menyatakan bahwa: “Faktor yang mengakibatkan rendahnya tingkat partisipasi politik masyarakat sebenarnya ada banyak selain dari adanya rasa bosan dan juga kecewa, menurut saya karena kurangnya kepedulian masyarakat tentang hak politik yang dimiliki, mereka berkata tidak ada manfaatnya menggunakan hak politik tersebut. Kadang-kadang juga masyarakat beranggapan suaranya cuma satu dan itu tidak akan berpengaruh jadi lebih baik saya tidak memilih dan memilih untuk bekerja.”

Hal tersebut di atas dibenarkan oleh ibu Beyek selaku anggota masyarakat menyatakan bahwa: “Pada saat adanya pilkada dirinya sendiri tidak ikut berpartisipasi pada saat itu, hal ini sebabkan sebagai adanya rasa kekecewaan pada pemimpin sebelumnya yang tidak dapat merubah keadaan apapun, sehingga dia tidak ikut memilih, dia mengakui lebih memilih pergi berladang dari pada ikut memilih pada saat itu.”.

Dari persepektif yang lain terdapat juga pendapat bahwa warga negara yang tidak ikut memilih misalnya, mungkin karena yakin keadaan sudah stabil dan siapapun yang terpilih tidak akan mengubah keadaan, justru itu warga negara yang disebut apatis itu, tidak berkonatasi negatif atau kecewa, melainkan sudah merasa puas dan percaya terhadap sistem politik yang ada.

Berdasarkan hal yang di atas dengan hasil wawancara penulis pada tanggal 12 Februari 2019 dengan bapak Faisal selaku Sekretaris Desa Selemak Kecamatan Hampan Perak Kabupaten Deli Serdang menjelaskan bahwa: “masyarakat yang tidak ikut berpartisipasi pada pilkada karena adanya kekecewaan, jenuh dan juga merasa

bosan dengan namanya pilkada karena tidak adanya perubahan apapun, sehingga masyarakat tidak datang ke TPS pada saat pilkada.”

Hal yang sama juga disampaikan oleh Riki Saputra selaku pengawas TPS pada saat pemilu menyatakan bahwa: “Masih banyak masyarakat yang tidak ikut memilih atau memberikan hak suaranya kepada salah satu calon, serta dia melihat masyarakat datang ke TPS tapi tidak ikut memilih, masyarakat hanya datang sebagai penonton saja tapi tidak ikut berpartisipasi”

Faktor-Faktor Penghambat Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Utara 2018

Faktor Internal, secara Faktor teknis, Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Syahrini selaku KPPS Desa Selemak Kecamatan Hampan Perak mengenai rendahnya partisipasi politik masyarakat pada saat Pilkada pada tahun 2018 yang lalu, beliau menjawab: “kalau saya lihat, kebanyakan para pemilih tidak ikut berpartisipasi pada pilkada kali ini dikarenakan dari urusan pribadi mereka, ya, Rata-rata alasan dari mereka adalah karena faktor pekerjaan, faktor ada urusan di luar kota, ada yang beralasan sakit dan banyak lagi. Tapi rata-rata dari alasan mereka tidak ikut memilih karena alasan pekerjaan.” (Wawancara dengan ibu Syahrini 7 Februari 2019)

Pendapat tersebut juga sesuai dengan yang di sampaikan oleh salah satu sekretaris desa selemak yaitu Bapak Faisal. Saat ditanya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya tingkat partisipasi politik masyarakat di Desa Selemak Kecamatan Hampan Perak pada saat pilkada tahun 2018. Beliau mengatakan bahwa: “Salah satu faktor rendahnya partisipasi politik masyarakat di Desa Selemak kalau menurut saya mungkin lebih karena pekerjaan dari masyarakat, dimana mereka beranggapan, ah dari pada saya repot-repot memilih lebih baik saya berjualan kan dapat meningkatkan pendapatan” (Wawancara 7 Februari 2019)

Sedangkan menurut salah satu pengawas TPS Riki Saputra saat ditanya mengenai permasalahan yang sama bapak Riki mengatakan bahwa: “Faktor yang mengakibatkan rendahnya partisipasi politik masyarakat sebenarnya ada banyak, pertama kalau menurut saya lihat lebih kepada kurangnya kepedulian masyarakat tentang hak politik yang dimiliki, mereka beranggapan tidak ada manfaatnya menggunakan hak politik tersebut. Kadang-kadang juga masyarakat itu suara saya cuma satu dan itu tidak akan berpengaruh jadi lebih baik saya tidak memilih dan memilih untuk bekerja atau alasan lain seperti sakit.” (Wawancara 12 Februari 2019)

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa masyarakat di Desa Selamak Kecamatan Hampan Perak seperti Ibu Norma saat ditanya mengapa dia tidak ikut memilih pada saat pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur SUMUT 2018, dia mengatakan: “Pada saat pemilihan gubernur dan wakil gubernur saya lebih memilih untuk beristirahat di rumah soalnya saya dalam keadaan tidak enak badan, jadi saya malas mau datang ke TPS.”(Wawancara 12 Februari 2019)

Faktor Pekerjaan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Mahmud yang sehari-harinya bekerja sebagai petani saat ditanya mengenai faktor yang mempengaruhi bapak sehingga tidak menggunakan hak pilihnya pada saat pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur 2018, menurut Bapak Mahmud mengatakan: “Pada saat pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur lalu saya tidak ikut memilih karena saya ada pekerjaan, namanya juga pekerja kasar kalau tidak bekerja tidak dapat uang, makanya saya lebih memilih bekerja dari pada saya datang ke TPS.” (wawancara 15 Februari 2019)

Berdasarkan wawancara dengan informan di atas jelas bahwa alasan ekonomi atau pekerjaan menjadi pertimbangan yang sangat sulit di tinggalkan mengingat pekerjaan yang dijalannya menuntut agar mereka tetap hadir meskipun sedang ada pesta demokrasi yang berlangsung, namun itu tidak menjadi penting jika sudah menyangkut dengan urusan kebutuhan hidup sehari-hari.

Faktor Eksternal, dari sisi Faktor Administrasi. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu informan yaitu KPPS desa selemak dengan ibu syahrini mengatakan bahwa penyebab rendahnya partisipasi politik masyarakat pada saat pemilihan gubernur dan wakil gubernur SUMUT 2018 menurutnya: “kalau faktor administrasi memang ada pengaruhnya ini diakibatkan oleh adanya pemilih ganda, pemilih yang sudah pindah tempat tinggal ada juga pemilih yang sudah meninggal tetapi masih terdaftar dalam DPT. Mengapa itu terjadi misalnya sudah meninggal tetapi masih terdaftar dalam DPT ini dikarenakan keluarga tidak mengurus yang namanya akte meninggal.”(Wawancara 7 Februari 2019)

Selain faktor yang disampaikan oleh ketua KPPS mengenai pemilih ganda, pemilih yang berpindah tempat tinggal dan pemilih yang meninggal. Faktor administrasi ini juga menyangkut terhadap pemilih yang tidak mendapatkan undangan sehingga tidak menggunakan hak suara yang dimilikinya. Seperti yang disampaikan oleh bapak Faisal selaku sekretaris Desa Selemak, saat ditanya faktor apa yang menyebabkan rendahnya partisipasi politik masyarakat pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur SUMUT 2018 yang lalu ia mengatakan; “Kalau saya lihat ada dua faktor yang menyebabkan rendahnya partisipasi politik masyarakat, pertama kalau saya lihat banyak masyarakat yang tidak mendapatkan kartu undangan, jadi mau tidak mau mereka ini tidak ikut memilih karena masyarakat malas untuk mengurus-ngurus kartu undangan tersebut.” (Wawancara 7 Februari 2018)

Pernyataan yang tidak jauh berbeda yang disampaikan oleh Riki Saputra selaku pengawas TPS saat ditanyak mengenai faktor apa yang menyebabkan banyaknya masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya pada saat pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Desa Selemak, menurut beliau: “banyaknya masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya pada saat pemilihan gubernur dan wakil gubernur yang lalu itu dipengaruhi oleh faktor pendataan, pendataan itu kalau saya lihat banyak yang tidak sinkron, misalnya saja ada masyarakat yang sudah meninggal namun dapat kartu undangan begitu juga sebaliknya ada masyarakat yang terdaftar dalam DPT namun tidak diberi kartu undangan. Memang masyarakat disini kalau saya lihat jika mereka betul-betul tidak diberi kartu undangan mereka tidak mau hadir ke TPS.”(Wawancara 12 Februari 2019)

Faktor Sosialisasi. Berdasarkan hasil wawancara dengan KPPS Desa Selemak saat ditanya mengenai adanya sosialisasi sebelum terlaksanakannya pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, ia mengatakan: “Kalau dari kami sosialisasinya hanya bersifat

pengetahuan terhadap ketua RT untuk menghimbau masyarakat untuk datang ke TPS-TPS untuk menggunakan hak pilihnya.” (wawancara 7Februari 2019)

Dalam hal sosialisasi yang memiliki peran penting sebenarnya bukan KPPS melainkan para calon dan partai politik karena para calon yang secara langsung mempunyai kepentingan agar masyarakat datang ke TPS untuk memilih mereka, selain itu partai politik juga mempunyai peran penting dalam hal ini karena partai politik merupakan kendaraan para calon tersebut.

Berdasarkan pendapat yang disampaikan oleh KPPS Desa Selemak bahwa sosialisasi atau kampanye terhadap masyarakat memang kurang efektif mengingat biaya yang dikeluarkan sangat tinggi, sehingga cenderung masyarakat kurang mengenal para calon peserta pemilu dan visi misi yang ingin disampaikan. Sehingga pada akhirnya menyebabkan banyaknya masyarakat yang tidak menggunakan hak pilih mereka.

Hal yang tidak jauh berbeda juga dikatakan oleh bapak Mahmud yang mengatakan: “saya tidak ikut pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur SUMUT pada waktu itu soalnya saya tidak tahu apa program-program yang ingin dilaksanakan oleh para calon, paling yang saya tahu cuma lihat spanduk-spanduk gambar calon.” (Wawancara 15Februari 2019)

Berdasarkan wawancara dengan beberapa masyarakat atau informan di atas jelas bahwa mereka kurang mendapatkan sosialisasi mengenai program-program atau visi misi yang ingin disampaikan oleh para calon kandidat sehingga mereka tidak menggunakan hak pilih yang mereka miliki, dan jika adanya sosialisasi yang mendalam dari kandidat atau tim sukses dari kandidat terhadap masyarakat kemungkinan besar masyarakat yang tidak ikut memilih karena faktor ini bisa berubah pikiran dan mau menggunakan hak pilih yang mereka miliki.

SIMPULAN

Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara 2018 ditemukan bahwa pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara tahun 2018 khususnya di Desa Selemak sudah berjalan dengan baik tetapi partisipasi politik masyarakat masih tergolong Rendah, dimana di Desa Selemak angka golput masih tergolong tinggi dengan jumlah 681 orang yang terdiri dari 330 orang pemilih laki-laki dan 351 orang pemilih perempuan sedangkan daftar pemilih tetap sebanyak 1.928 orang. Hal tersebut juga tergambarkan dari hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada beberapa informan dan berdasarkan observasi yang dilakukan oleh penulis. Terlihat juga bahwa dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara tahun 2018 di Desa Selemak, kesadaran politik masyarakat bisa dikatakan masih rendah.

Faktor-faktor yang menghambat partisipasi politik masyarakat di Desa Selemak pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara 2018 disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang terdiri dari faktor teknis dan faktor pekerjaan sedangkan faktor eksternal terdiri dari faktor administrasi dan faktor sosialisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Sahya, A. (2013). *Sistem Politik di Indonesia*. Pustaka Setia: Bandung
- Arifin, A. (2011). *Komunikasi Politik*. Graha Ilmu. Yogyakarta. Ayi Sofian. 2012. *Etika Politik Islam*. CV Pustaka Setia: Bandung
- Budiarjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. PT. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta
- Budiarjo, M. (1992), *Pengertian-Pengertian Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Pers Hafied Cangara. 2016. *Komunikasi Politik*. PT RajaGrafindo Persada: Depok Mukarom, Zaenal. 2016. *Komunikasi Politik*. Bandung. Pustaka Setia
- Hasibuan, S.J. Kadir, A. & Nasution, M.H.T. (2018). *Strategi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pemilihan Gubernur Sumatera Utara 2018*. PERSPEKTIF, 7 (1): 1-5.
- Kusmanto, H. (2014). *Partisipasi Masyarakat dalam Demokrasi Politik*, JPPUMA: *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political UMA)*, 2 (1): 77-89
- Kusmanto, H., (2013). *Peran Badan Permusyawaratan Daerah dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat*, JPPUMA: *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political UMA)*, 1 (1): 41-47.
- Lestari. (2009). *Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur JawaTengah Tahun 2008*
- Mahendra. 2016. *Orientasi Memilih Calon Dan Partisipasi Politik Masyarakat Desa Wirata Agung Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2015*
- Akbar, M. (2016). *Partisipasi Masyarakat Dalam Memilih Calon Bupati Gowa Pada Pilkada 2015 Kabupaten Gowa*
- Nurcholis, H. dkk. (2009+). *Administrasi Pemerintahan Daerah*. Penerbit Unversitas Terbuka
- Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2005, *Tentang Pemilihan, pengesahan pengangkatan, dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah*
- Ansradi, P. (2017). *Partipasi Masyarakat Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 Di Kecamatan Tampan Kota Pekan Baru*. *Jurnal Fisip Vol 4. No. 2*
- Sitepu, A. (2012). *Teori-Teori Politik*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (MIXED METHODS)*. Alfabeta Bandung.
- Suharyanto, A., (2016), *Surat Kabar Sebagai Salah Satu Media Penyampaian Informasi Politik pada Partisipasi Politik Masyarakat*, *Jurnal Administrasi Publik*, 6 (2): 123-136.
- Surbakti, R. (1992), *Memahami Ilmu Politik*, Gramedia Widya Sarana, Jakarta
- Ahkam, S. (2016). *Pengaruh Sosialisasi Politik dan Status Sosial Ekonomi Terhadap Partisipasi Politik Pada Pemilihan Walikota 2015 Di Kelurahan Air Putih Kota Samarinda*
- Ardyan, T. (2016). *Pengaruh status sosial ekonomi terhadap partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala daerah kabupaten lampung selatan tahun 2015 (Studi Perbandingan Kelurahan Way Urang Dan Kelurahan Bumi Agung Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan)*
- Undang-undang Republik Indonesia No. 32 tahun 2004, *Tentang Pemerintahan Daerah*
- Undang-undang No. 1 tahun 2015, *Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang*
- Zakarias. (2017). *Partisipasi Politik Masyarakat pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara 2015 (Studi Di Kelurahan Kolangan Beha Kecamatan Tahuna Barat Kabupaten Kepulauan Sangihe)*
- Zega, M.A. Muda, I. Batubara, B.M. & Suharyanto, A. (2018). *Pengaruh Program Rumah Pintar Pemilu Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Medan*, PERSPEKTIF, 7 (2): 60-65.
- Danil, Z. (2016). *Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa (PILKADES) Di Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan*
- Suharyanto, A., (2014). *Partisipasi Politik Masyarakat Tionghoa dalam Pemilihan Kepala Daerah*, JPPUMA: *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political UMA)*, 2 (2): 166-175
- Ivanna, J. Pardede, A.J. & Iqbal, M. (2018). *Peran Media Cetak dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Di Kelurahan Bandar Selamat Kecamatan Medan Tembung Kota Medan*. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 1 (1): 25-35.
- Wardhani, P.S.N. (2018). *Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum*. *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10 (1): 57-62.